

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abbas, Syahrizal. 2010. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Banda Aceh: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachro, Renny Suprinyatni., dan Andi Fariana. 2016. *Model Alternatif Mediasi Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Bandung: Mitra Wacana Media.
- Dantes, Nyoman. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Halim, Halim. 2010. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Makara, Taufik. 2009. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Al Hikmah.
- Mardani. 2010. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Refika Aditama.
- Mujahiddin, Ahmad. 2012. *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rasyid, A. Rohain. 2006. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suadi, Amran. 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Sutiarso, Cicut. 2011. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*.

Jakarta : Pustaka Obor Indonesia.

Zuhriah, Erfaniah. 2014. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: Setara Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PERMA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

C. Internet

<http://mediasi.mahkamahagung.go.id/tentang-mediasi/tanya-jawab-perma-12008/>

(10 April 2018 pukul 19.43 WIB)

<http://www.pa-payakumbuh.go.id/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016/45>

(1 April 2019 pukul 21.00 WIB)

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/tak-hanya-ikut-pelatihan-hakim-ekonomi-syariah-harus-disertifikasi>

(5 April 2019 pukul 19.20 WIB)

<http://pa-bukittinggi.go.id/en/tentang-kami/hakim-pegawai-dan-staf/hakim> (26

Juni 2019 pukul 21.14 WIB)

<http://pa-bukittinggi.go.id/en/tentang-kami/hakim-pegawai-dan-staf/wakil-ketua>

(26 Juni 2019 pukul 21.20 WIB)

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bukittinggi/periode/register/>

(5 Juli 2019 pukul 09.37 WIB)

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bukittinggi/direktori/perdata-agama/ekonomi-syariah/>

(5 Juli 2019 pukul 13.12 WIB)

